

Cegah Korupsi Proyek

Ganjar Larang Transaksi Tunai

SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan Pemprov Jateng akan menerapkan sistem non chas transactions (NTC) atau tidak melakukan sistem pembayaran tunai atau langsung dalam transaksi pembayaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jateng. Semua transaksi pengadaan barang nantinya akan dilakukan dengan menggunakan jasa perbankan atau dengan cara ditransfer melalui bank.



Kami akan menerapkan cara ini guna untuk mencegah terjadinya korupsi di dalam proyek pengadaan barang. Cara juga akan kita sampaikan ke Pemkab/Pemkot se-Jateng agar juga ikut menerapkannya."

GANJAR PRANOWO
Gubernur Jawa Tengah



FOTO: PRAST WDJATENGPOS
Ganjar Pranowo dan Ketua BPK RI Hadi Poernomo.

"Kami akan menerapkan cara ini guna untuk mencegah terjadinya korupsi di dalam proyek pengadaan barang. Cara juga akan kita sampaikan ke Pemkab/Pemkot se-Jateng agar juga ikut menerapkannya," kata Ganjar Pranowo usai melakukan pertemuan dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Hadi Poernomo di ruang kerjanya, Jumat (13/9).

Pertemuan itu juga dihadiri Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono, pimpinan instansi vertikal Jateng, dan para pejabat di lingkungan BPK RI.

Ganjar mengatakan, hasil uadit BPK RI terhadap keuangan Pemprov Jateng memang bagus. Terbukti pada tahun ini Pemprov Jateng kembali memperoleh prediket WTP alias wajar tanpa pengecualian. Namun menurut

■ Baca CEGAH ...hal 7

Cegah

dari hal 1

BPK, prediket WTP belum menjamin Jawa Tengah sudah bebas dari korupsi. Setelah sukses meraih WTP, kali ini Jawa Tengah ingin memperoleh WTP dengan tidak korupsi. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan cara itu. Yaitu tidak melakukan transaksi dengan cara uang tunai atau langsung di dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemprov.

"Ini akan berlaku untuk proyek baru yang akan terjadi setelah ini. Untuk proyek yang lama dan sudah berjalan tidak menggu-

nakan cara ini, nanti malah mencurigai saya yang bukan-bukan. Pak Ganjar *ki senengane* mencari. Biar kan yang kemarin berjalan seperti kemarin, yang proyek baru kita terapkan cara ini," terang Ganjar.

Menurut Ganjar, kebijakan ini diambil setelah pihaknya mendapatkan penawaran dari BPK RI. Tanpa pikir panjang, pihaknya langsung menyetujui. Dan Pemprov Jateng menjadi provinsi ke lima yang akan menerapkan cara ini, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jabar dan Banten.

"Mudah-mudahan nanti,

cara ini akan dilakukan secara nasional. Kalaupun tidak, setidaknya Jateng dan beberapa provinsi lain sudah menggunakannya," katanya.

Apakah akan menggunakan Pergub sebagai landasan penggunaan cara ini? Menurut Ganjar, pihaknya tidak akan mengeluarkan Pergub. "Kita sampaikan secara lesan seperti ini. Jika ada yang menolak ya kita akan ajak berbicara, berdialog. Mengapa tidak mau menggunakan cara ini," ucapnya.

Sementara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Hadi Poernomo men-

gatakan, pihaknya memang menawari Gubernur Jateng untuk menerapkan cara ini. Tanpa lama berpikir, gubernur langsung menyatakan akan menerapkan cara NTC ini di Jawa Tengah.

"Sejauh ini baru lima provinsi yang sepakat dengan cara ini. Minggu depan Provinsi DIY, beberapa BUMN dan Kementerian. Pertama kali yang setuju adalah Pemprv DKI, pekan kemarin," kata Hadi.

Dia mengatakan, dengan menggunakan cara ini, Pemprov Jateng akan dapat menekan peluang terjadinya korupsi dalam proy-

es pengadaan barang dan jasa di Pemprov Jateng dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Karena transaksi ini dapat di trace, ditelusuri, di tracking secara mudah dan terdokumentasi.

"Nantinya, setiap pihak ketiga yakni yang memenangkan lelang bertransaksi kepada pihak keempat maka pembayarannya harus dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening bank. Untuk nama banknya bebas. Kita tidak boleh mengarahkan bank yang dipakai," ucapnya. (saf)